

Judul : DPR: Usut Teror Air Keras pada Aktivis Kontras
Tanggal : Minggu, 15 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1

DPR: USUT TEROR AIR KERAS PADA AKTIVIS KONTRAS

Menko Bidang Kumham Impipas Yusril Ihza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisasi.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengesakan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras, Andrie Yunus. Alat kelengkapan DPR, yang bertugas mengawasi kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, ini berjanji akan mengawal agar penyidikan kasus itu oleh kepolisian berjalan cepat.

"Kami sudah menghubungi Kapolda Metro Jaya (Jen Asep Edi Suherd) dan meminta agar pihak kepolisian bergerak cepat mengusut kasus ini dan menangkap para pelakunya. Terhadap Andrie Yunus juga harus ada pengawasan maksimal agar beliau benar-benar aman dari ancaman kekerasan susulan," kata Ketua Komisi III DPR Habibur Rokhman melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Seruan serupa datang dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, pola serangan yang dialami Andrie mengindikasikan adanya perencanaan yang terorganisasi sehingga penegakan hukum tak boleh berhenti pada tingkat pelaku di lapangan.

"Tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dari Kontras adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri. Aktivis HAM bekerja untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara karena penegakan HAM dan demokrasi merupakan amanat konstitusional," kata Yusril, Sabtu.

Pada Kamis (12/3) malam, Andrie disiram dengan air keras sekuat melakukan perekaman siniar (*podcast*) bertajuk "Temiliterisme dan Judicial Review di Indonesia" di kantor YLBHI Jakarta. Pesisirnya pukul 23.37 WIB, Andrie disiram dengan air keras saat mengendarai sepeda motor di Jalan Safenba I ke arah Jalan Talang, Jakarta, oleh pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Hingga kini, Andrie yang mengalami luka bakar 24 persen dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Sebelum perekaman siniar di kantor YLBHI, Andrie meninggalkan kantor Kontras pukul 15.30 untuk menghadiri



Andrie Yunus

peremuan di kantor Celsius, membahas tindak lanjut laporan investigasi Komisi Pencari Fakta mengenai Aksi Agustus 2025.

Perwakilan Kontras, Jane Rosalina, menuturkan, Andrie mengalami luka bakar sekitar 24 persen akibat reaksi inflamasi dari cairan keras yang mengenai kulit. Luka itu terutama pada area wajah, khususnya di sisi kanan, termasuk pada mata kanan, kedua tangan, dan bagian dada.

Dari sejumlah luka yang dialami, kondisi paling serius terdapat pada mata kanan dan saat ini telah mendapatkan penanganan khusus dari dokter spesialis bedah mata.

Sabtu, mantan penyidik KPK yang juga pernah disiram dengan air keras, Novel Baswedan, dan mantan Gubernur Anies Baswedan membesuk Andrie di RSCM. Keduanya disambut oleh beberapa pengurus Kontras.

Novel meyakini peristiwa yang menimpa Andrie bukanlah kejahatan yang spontan. Serangan itu merupakan tindakan dengan motif tertentu. Untuk itu, kepolisian harus segera menuntaskan kasus tersebut secara transparan.

Pelanggaran hak aman

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Ibbayah mengatakan, serangan terhadap Andrie merupakan pelanggaran hak atas rasa aman yang telah dijamin dalam Pasal 29G UUD NRI 1945 serta Pasal 28-35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Melalui keterangan tertulis, Anis menyebutkan, mengingat aktivitas Andrie sebagai anggota Kontras dan Tim

Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang aktif bersikap kritis dalam melakukan kerja-kerja pembelaan HAM, patut diduga serangan yang ia alami merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap pembela HAM.

Komnas HAM mendorong kepolisian dapat secara independen, cepat, transparan, dan akuntabel melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara itu. Komnas HAM juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar memberikan akses perlindungan pada korban dan pihak yang berkaitan dengan serangan itu jika dibutuhkan.

Sederet teror

Komisioner Komnas Perempuan, Sri Agustini, pun mengingatkan, Indonesia pada 2026 terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Untuk itu, Indonesia memiliki kewajiban memimpin kepatuhan negara anggota PBB pada prinsip-prinsip HAM.

"Kewajiban itu harus dibuktikan dengan menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri, khususnya kasus penyerangan terhadap Andrie," ucapnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengingatkan, teror bukan kali ini saja terjadi. Beberapa waktu belakangan ini, sejumlah orang dari kalangan mahasiswa, jurnalis, pemengaruh, dan aktivis juga menerima teror, baik paket berisi kepada bintang maupun serangan secara digital. Sebut saja Francisca Christy Rosana, Tiyo Ardianito, DJ Dorny, Virdan Aurelino, dan Sberly Annavita.

Politisi PDI-P, Guntur Romli, mengatakan, teror yang menimpa Andrie harus menjadi momentum bagi semua kelompok prodemokrasi untuk bersatu dan melawan segala tindakan teror dan represi.

Di Yogyakarta, sejumlah clemen masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas, menuntut kepolisian agar mengusut tuntas kasus itu secepat mungkin. Beberapa poster itu antara lain bertuliskan "Kami Bersama Andrie", "Makin Berani karena Andrie", dan "Sori Ora Wedi".

(DYP/NCA/HR8)